

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN BELANJA MODAL PADA KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH MELALUI SITUS RESMI PEMERINTAH PROVINSI

Jeckly Dharma Jaya¹
Eka Ardhani Sisdyani²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud). Bali. Indonesia
e-mail: jecklydharmajaya@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud). Bali. Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan belanja modal pada kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 32 sampel pemerintah provinsi dengan 96 observasi yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia

Kata kunci: Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah, PAD, DAU, Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local revenues (PAD), general fund allocations (DAU), and capital expenditures on the completeness of the disclosure of financial information through the official website of local provincial governments in Indonesia. This study uses a sample of 32 provincial governments with 96 observations obtained using purposive sampling method. The analysis technique used is a binary logistic regression. The results show that the local revenue and capital expenditure have significant positive effect on the completeness of the disclosure of financial information through the official website of local provincial governments in Indonesia, while the general fund allocations does not affect the completeness of the disclosure of financial information through the official website of local provincial governments in Indonesia.

Kata kunci: *completeness disclosure of financial information, PAD, DAU, capital expenditure*

PENDAHULUAN

Informasi merupakan media yang digunakan setiap organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Melalui informasi juga organisasi dapat menambah nilai dari organisasi itu sendiri dengan mengungkapkan informasi secara lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Style dan Tennyson (2007) mengungkapkan bahwa *internet* merupakan media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang paling efektif dalam menyampaikan informasi. Keuntungan menggunakan internet dalam penyampaian informasi juga dikemukakan oleh Groff dan Pitman (2004) yang berpendapat bahwa internet menciptakan suatu kemampuan bagi entitas untuk menyampaikan berbagai jenis informasi termasuk informasi keuangan kepada setiap orang.

Bagi organisasi pemerintahan, penyampaian informasi terutama informasi keuangan melalui media internet akan mendongkrak citra yang positif bagi organisasi pemerintah itu sendiri. Hartono dan Mulyanto (2010) berpendapat pemerintah yang mengungkapkan informasi keuangan melalui media internet diasumsikan lebih efisien dan efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pengungkapan informasi keuangan pemerintah melalui media internet diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang bertujuan membentuk pemerintah yang transparan dan akuntabel. Salah satu perwujudan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu *e-Government*. *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang

digunakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan mengenai pemerintah itu sendiri.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan suatu daerah otonom dari potensi yang dimiliki suatu daerah dan dana lainnya yang disahkan berdasarkan undang-undang yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah otonom. Dana alokasi umum adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Rora (2010) dan Martani (2012) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum adalah pos dalam APBD yang menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum merupakan pos yang material yang penggunaannya harus diungkap secara penuh.

Afryansyah (2013) berpendapat bahwa setiap kepala daerah ingin dipandang sebagai pemimpin. Oleh karena itu setiap kepala daerah selalu membuat keputusan yang akan membuat dirinya dikagumi. Salah satunya dari keberhasilan kepala daerah dalam melakukan investasi dari proyek-proyek yang membuat pelayanan kepada masyarakat bertambah. Besarnya investasi tersebut dapat dilihat dari pos belanja modal pemerintah yang tertuang dalam APBD.

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan setiap entitas terjadi hubungan keagenan didalamnya. Anthony dan Govindarajan (2005), berasumsi setiap individu dalam hubungan keagenan termotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* yang disebabkan salah satu pihak melanggar kontrak yang telah disepakati. Kaitannya

dalam hal ini yaitu masyarakat tidak dapat mengawasi seutuhnya setiap tindakan dan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah yang disebabkan oleh asimetri informasi.

Informasi asimetri muncul akibat adanya penguasaan informasi yang tidak seimbang antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah lebih menguasai informasi karena pemerintah yang memiliki akses langsung pada hasil kinerja pemerintah itu sendiri sehingga ketika informasi kinerja disampaikan kepada masyarakat menimbulkan perbedaan informasi yang diterima masyarakat dengan kenyataan sesungguhnya. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengungkapkan informasi keuangan melalui media internet. Menurut Hermana dan Robby (2013) transparansi informasi keuangan dengan menggunakan media internet akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu entitas yakni pemerintah daerah.

Prinsip pengungkapan penuh menjadi harapan bagi masyarakat dalam mendambakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Aliyah dan Aida (2012) mengungkapkan bahwa dengan menerapkan prinsip pengungkapan penuh, pemerintah dapat menjaga mandat dan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. Sehingga prinsip ini sangat berguna membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.

Isu mengenai materialitas sudah menjadi pertimbangan yang lazim dalam dunia akuntansi. Zimmerman (1970) menyatakan bahwa prinsip materialitas menjadi prinsip yang selalu diutamakan dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah. Hal ini disebabkan pemerintah ingin menciptakan suasana yang kondusif dalam penyampaian kinerja keuangan pemerintah yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah itu sendiri. Sukhemi (2011) juga berpendapat bahwa prinsip materialitas tidak bisa lepas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah agar terlepas dari opini masyarakat yang terbentuk atas pemberitaan penyalahgunaan dana APBD yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum di birokrasi pemerintahan Indonesia.

Glasser (1998) menjelaskan pada dasarnya manusia melakukan hal yang telah mereka putuskan. Perilaku yang dilakukan setiap individu merupakan upaya terbaik untuk mencapai apa yang diinginkan untuk memuaskan kebutuhan pribadi. Kepala pemerintah daerah tidak ingin dipandang sebagai pemimpin yang gagal dalam kepemimpinannya. Oleh karena itu setiap kepala pemerintah daerah selalu berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk mengungkapkan informasi keuangan pemerintahan yang dijalaninya. Christaens (1999) berpendapat bahwa kepala pemerintah daerah cenderung untuk memutuskan membentuk pemerintah yang transparan dengan cara mengungkapkan segala informasi pemerintah termasuk mengenai informasi keuangan untuk menjaga kesan kepala pemerintah daerah itu sendiri dari kesan-kesan negatif yang ada di masyarakat. Namun kenyataannya di Indonesia, hanya sedikit pemerintah daerah di Indonesia cenderung untuk mengungkapkan informasi pemerintahnya tanpa sebab yang pasti.

Pendapatan asli daerah menunjukkan efektifitas pemerintah daerah dalam mengelola potesi daerah untuk dijadikan sebagai pendapatan secara otonomi yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah memiliki tingkat material yang membuat pemerintah daerah lebih memilih untuk membatasi akses informasi mengenai pendapatan asli daerah kepada masyarakat (Craven & Marston, 1999).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Medina (2012) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah tersebut. Kesimpulan yang sama juga dikemukakan oleh Laswad *et.al.* (2005) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah berdasarkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* pemerintah daerah itu sendiri.

UU Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum bersifat “*Block Grant*” yang artinya kepala daerah dapat menggunakan dana alokasi umum sesuai kebutuhan suatu daerah yang diprioritaskan secara bertanggung jawab. Robbin dan Austin (1986) menyatakan bahwa besarnya dana alokasi umum yang diterima menggambarkan tingkat ketergantungan yang dimiliki suatu pemerintah daerah. Liestiani (2008) mengungkapkan bahwa pemerintah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi memiliki tekanan dari pemerintah pusat untuk mengungkapkan informasi keuangan daerah lebih lengkap.

Belanja modal merupakan penggunaan dana APBD yang dilakukan pemerintah daerah untuk menambah umur atau jumlah aktiva tetap. Belanja modal digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat memperoleh pelayanan yang ramah dan berkualitas. Sehingga membuat kinerja pemerintah daerah di mata masyarakat menjadi positif. Afryansyah (2013) berpendapat bahwa besarnya belanja modal yang dikeluarkan pemerintah dalam melakukan investasi untuk kesejahteraan masyarakat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan.

Berdasarkan landasan teori dan dasar pemikiran yang diuraikan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia

Ha₂: Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia

Ha₃: Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia yang tercantum di Portal Nasional Republik Indonesia dengan mengakses

www.indonesia.go.id. Yang menjadi objek penelitian ini adalah kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia.

Kelengkapan Pengungkapan informasi keuangan daerah merupakan informasi keuangan daerah yang tersedia secara lengkap melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia. Informasi keuangan daerah yang diteliti adalah informasi keuangan daerah yang menjadi kriteria yang digunakan dalam Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) berupa: APBD, Perubahan APBD, dan Laporan Realisasi APBD.

Kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah diukur dengan menggunakan *variabel dummy*. Jika terdapat pengungkapan informasi keuangan daerah yang sesuai kriteria PeGI akan diberi *score* 1. Sebaliknya jika tidak terdapat pengungkapan informasi keuangan daerah yang sesuai kriteria PeGI akan diberi *score* 0.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan suatu daerah otonom dari potensi yang dimiliki suatu daerah dan dana lainnya yang disahkan berdasarkan undang-undang yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah otonom. Pendapatan Asli Daerah diproksikan dengan rasio kemandirian.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \dots\dots\dots (1)$$

Dana alokasi umum adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum diproksikan dengan rasio ketergantungan

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \dots (2)$$

Belanja modal merupakan penggunaan dana APBD yang dilakukan pemerintah daerah untuk menambah umur atau jumlah aktiva tetap.

$$\text{Belanja Modal} = (\text{Belanja Modal}) \dots (3)$$

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dengan mengakses www.djpk.depkeu.go.id yang merupakan situs resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia dan daftar pemerintah daerah yang diperoleh dengan mengakses www.indonesia.go.id.

Dari 34 Pemerintah provinsi di Indonesia hanya 1 pemerintah provinsi yang belum memiliki situs resmi pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru diresmikan tanggal 25 Oktober 2012 melalui Sidang Paripurna Komisi II DPR RI dan Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memiliki situs resmi tetapi tidak dapat diakses. Hal ini disebabkan fasilitas penunjang yang belum mumpuni yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menjalankan situs resmi Pemerintah Maluku Utara itu sendiri.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode *purposive sampling* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Jumlah Sampel yang Digunakan

No.	Kriteria	Jumlah
1	Pemerintah provinsi yang tercantum dalam portal nasional RI	34
2	Pemerintah provinsi yang belum memiliki situs resmi	-1
3	Pemerintah provinsi yang datanya tidak lengkap	-1
4	Pemerintah Provinsi yang digunakan sebagai sampel	32
Total observasi selama 3 tahun penelitian		96

Sumber: Data diolah, 2013

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam regresi logistik, uji asumsi klasik tidaklah wajib untuk dilakukan karena variabel regresi logistik bersifat dikotomi (Sarwono, 2013:48). Namun dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang tetap dilakukan adalah uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keyakinan dalam memproksikan variabel terikat.

Dalam uji asumsi klasik, uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui korelasi antar variabel. Persamaan regresi yang baik tidak mengandung korelasi antar variabelnya. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinearitas

	Model	Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	RPAD	0,785	1,275
	RDAU	0.612	0.1636
	LBM	0.745	1.343

Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel 2, koefisien tolerance dari variabel PAD, DAU, serta Belanja Modal lebih besar dari 0,10 serta VIF lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan tidak terdapat gejala multikoliner dan layak untuk digunakan.

Uji Autokorelasi berfungsi untuk melacak adanya pengaruh data dari pengamatan sebelumnya. Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat dari tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2.228

Sumber: Data Diolah 2013

level of signifikan 5 persen, $n = 96$ dan $k = 3$, $d_L = 1,60$ dan $d_U = 1,73$ pada sisi kiri $d_L = 2,27$ dan $d_U = 2,40$ pada sisi kanan. Dengan demikian d statistik yang ditunjukkan pada tabel 4.3 berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Hal ini menunjukkan tidak terdapat gejala autokorelasi pada data yang digunakan sehingga model regresi yang akan digunakan layak untuk memprediksi.

Uji analisis model fit bertujuan untuk menilai keseluruhan model regresi. Adanya pengurangan nilai antara $-2 \text{ Log Likelihood}$ awal dengan nilai Log Likelihood pada langkah berikutnya menunjukkan model yang dihipotesiskan telah sesuai dengan data. Hasil uji analisis model fit dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Analisis Model Fit

Iteration		2Loglikelihood	Constant	RPAD	RDAU	LBM
Step 1	1	121.259	-1.505	2.779	.596	.000
	2	118.900	-2.200	3.262	1.503	.000
	3	116.841	-3.393	3.938	3.130	.000
	4	116.502	-4.065	4.319	4.022	.000
	5	116.498	-4.137	4.352	4.117	.000
	6	116.498	-4.138	4.353	4.119	.000
	7	116.498	-4.138	4.353	4.119	.000

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 4 menunjukkan nilai *-2 Log likelihood* awal sebesar 133.084 lebih besar dari *-2 Log likelihood* akhir sebesar 116,084. Penurunan *-2 Log likelihood* ini menunjukkan model yang dihipotesiskan telah sesuai dengan data.

Uji kelayakan model regresi dilakukan untuk melihat model yang dihipotesiskan telah sesuai dengan data. Tes statistik yang digunakan dalam hal ini adalah *Hosmer and Lemeshow*. Keputusan yang diambil yaitu jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis dapat diterima. Hasil olahan data uji ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	7.837	8	.450

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 5 menunjukkan signifikansi *Hosmer and Lemeshow* adalah sebesar $0,450 > 0,05$. Hal ini berarti model dapat dikatakan mampu memprediksi observasi karena sesuai dengan data yang digunakan.

Uji Nagelkerke R Square ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal mempengaruhi variabel tetap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah. Hasil olah data uji ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6.
Model Summary

Step	-2 Loglikelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	116.498	.159	.212

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 6 menunjukkan bahwa Nagelkerke R Square sebesar 0,212. Hal ini menunjukkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal mempengaruhi kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah sebesar 21,2% sedangkan 88,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 7.
Hasil Uji Regresi Logistik Biner

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1	PAD	4.353	1.589	7.506	1	.006	77.702
	DAU	4.119	2.341	3.095	1	.079	61.470
	BM	.000	.000	4.551	1	.033	1.000
	Constan	-4.138	1.639	6.376	1	.012	.016

Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel 7 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$\ln \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 BM \dots \dots \dots (1)$$

$$\ln \frac{p}{1-p} = -4,138 + 4,353PAD + 4,119DAU + 0,000BM \dots\dots\dots (2)$$

$$p = 1/(1 + e^{-(-4,138+4,353PAD+4,119DAU+0,000BM)}) \dots\dots\dots (3)$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta menunjukkan -4,138 mempunyai arti bahwa jika pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal memiliki nilai konstan maka kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah akan menurun sebesar 0,016 (yang diperoleh dari $1/(1 + e^{4,138})$).

Koefisien regresi logistik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,353 mempunyai arti bahwa apabila PAD naik sebesar satu satuan, maka probabilitas kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah meningkat sebesar 0,987 (yang diperoleh dari $1/(1 + e^{-4,353})$) dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Koefisien regresi logistik dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 4,119 mempunyai arti bahwa apabila DAU naik sebesar satu satuan, maka probabilitas kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah meningkat sebesar 0,984 (yang diperoleh dari $1/(1 + e^{-4,119})$) dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Koefisien regresi logistik dari belanja modal sebesar 0,000 mempunyai arti bahwa apabila belanja modal naik sebesar satu satuan, maka probabilitas kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah meningkat sebesar 0,5 (yang diperoleh dari $1/(1 + e^{-0,000})$) dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Pengujian hipotesis pertama yang menyebutkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan dapat diterima. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel 7 yang menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 4.353 dengan

signifikansi 0,006 dibawah 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) dan Laswed *et al.* (2005) yang berpendapat bahwa pendapatan asli daerah pemerintah daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan daerah secara *online*. Hasil penelitian berbeda dengan Suzana Jorge *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan tinggi rendahnya pendapatan asli daerah yang dimiliki Pemerintah di Portugal dan Italia tidak mengurangi niat untuk mempublikasi laporan keuangan masing-masing pemerintah melalui internet dan sekaligus membuktikan bahwa Pemerintah di Spanyol dan Portugal mengutamakan prinsip transparan dalam keuangan mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini besarnya pendapatan asli daerah yang dimiliki setiap pemerintah daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan daerah secara *online*.

Pengujian hipotesis alternatif kedua yang menunjukkan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan ditolak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7 yang menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 4.119 namun signifikansi 0,079 diatas 0,05. Liestiani (2008) dan Ingram (1984) juga menunjukkan hasil yang sama. Hal ini disebabkan tidak adanya monitoring khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menentukan anggaran dana perimbangan di pemerintah daerah sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya. Sedangkan insentif laporan keuangan yang diberlakukan bagi pemerintah daerah pada tahun 2010 hanya digunakan dasar

oleh pemerintah daerah dalam pencapaian opini bukan dalam hal kualitas pengungkapan.

Pengujian hipotesis alternatif ketiga yang menunjukkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan diterima. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7 yang menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,000 dengan signifikansi 0,033 dibawah 0,05. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afryansyah (2013) yang menyatakan bahwa tingkat investasi yang diukur dengan besarnya belanja modal pemerintah daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan daerah secara *online*. Hal ini disebabkan pemerintah daerah ingin menunjukkan prestasinya dari investasi yang mampu melayani masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia.

Saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel karakteristik daerah dan opini auditor. Objek penelitian yang akan diteliti sebaiknya melihat pemerintah daerah tingkat II.

REFERENSI

- Afryansyah, Rahmad Dian. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi* Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang
- Aliyah, Siti, dan Nahar, Aida. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *E-journal Universitas Diponegoro*. Vol. 8, No.2
- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control Systems*. Salemba Empat: Jakarta
- Astika, Putra IB. 2010. *Teori Akuntansi: Konsep-Konsep Dasar Akuntansi Keuangan*. Denpasar
- Christaens, J. 1999. Financial Accounting Reform in Flemish Municipalities: An Empirical Investigation. *Financial Accountability & Management*. Vol. 15, pp: 21-40
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ke 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Glasser, M.D. William. 1998. *Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom*. Author of Reality Therapy.
- Groff, J. E. and Pittman, M. K. 2004. Municipal Financial Reporting on The World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on The Official Websites of The 100 Largest U.S. Municipalities. *Journal of Government Financial management*. Vol. 53, pp: 20-30
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, D. U. dan Mulyanto, E. 2010. *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web*. *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol. 6 No. 1

- Hermana, Budi dan Ruby Loho. 2013. Transparansi Informasi Keuangan dan Popularitas Website Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia. *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*. Volume 1, Nomor 1 Februari 2013
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *“Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital”*, Yogyakarta: Andi
- Indriantoro, Nur dan Supomo Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Ingram, R. W. 1984. Economics Incentis and The Choice of State Government Accounting Practices. *Journal of Accounting Research*. Vol. 22, No. 1, pp: 126-144
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Volume 3, pp: 305-360
- Laswad, Fawzi, Richard Fisher, dan Oyelere, Peter. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24, pp: 101-121
- Liestiani, Annisa. 2008. Pengungkapan LKPD Kab/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok*
- Martani, Dwi and Lestiani Annisa. 2012. Disclosure in Local Government Financial Statement: the Case of Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance*. Vol 3, pp: 67-84
- Medina, Febri. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah. *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok*
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1
- Nugroho, Bhono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Semarang: ANDI
- Rahyuda, I Ketut, Murjana Yasa, I.G.W. dan Yuliarmi, Ni Nyoman. 2004. *Metodologi Penelitian*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar
- Robbins, W. A. and Austins, K. R. 1986. Disclosure Quality in Governmentan Financial Reports An Assessment of The Appropriateness of A Compound Measure. *Journal of Accounting Research*. Vol 24, No. 2, pp: 412-421

- Rora, Puspita dan Martani, Dwi. 2010. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemerintah daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin 20-23 September 2012
- Sarwono, Jonathan. 2013. *12 Jurus Ampuh SPSS Untuk Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Styles, Alan K., and Tennyson, Mack. 2007. The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Vol. 19, No. 1, pp: 56-92
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sukhemi. 2011. Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah. *Jurnal Akmenika UPY*. Volume 8
- Suzana, Jorge, Moura, Patricia, Pattaro, Anna Francesca, Lourenco, Rui Pedro. 2010. Local Government Financial Transparency in Portugal and Italy: a comparative exploratory Study On Its Determinants. *Electronic copy available at <http://neapp.eeg.uminho.pt>*
- Zimmerman, Jerold L. 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*. Vol. 15, pp: 107-144
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah
- Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
- Peraturan Perintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah